

Pengaruh Tarif Perdagangan, Nilai Tukar dan Produk Domestik Bruto Terhadap Ekspor Produk Pertanian Indonesia Ke 5 Negara Asean dalam Prespektif Ekonomi Islam Tahun 2015-2024

Novita Sari¹, Madnasir², Yulistia Devi³, Ghina Ulfah Saefurrohman⁴

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia. E-mail: novitasarii656@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia. E-mail: madnasir@radenintan.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia. E-mail: yulistiadevi@radenintan.ac.id

⁴ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia. E-mail: ghinaulfa@radenintan.ac.id

Abstract: In ten Indonesian provinces with the highest rates of poverty between 2015 and 2024, this study looked at the impact of open unemployment, income inequality, and the Human Development Index (HDI) on poverty. As part of a quantitative technique, this analysis makes use of panel data from Central Statistics Agency publications. After all collected data was analyzed using the panel data regression approach, tests conducted using the Eviews 12 application revealed that the Fixed Effect Model (FEM) was the best specification. The results show that income inequality has a major impact on rising rates of poverty. However, the HDI variable's positive but insignificant correlation shows that improvements in human development quality have not directly impacted the decline in poverty in these areas. In addition, the open unemployment rate was also not proven to affect changes in poverty levels. In the context of Islamic economics, equitable distribution of wealth, protection for vulnerable groups, and optimization of social instruments such as zakat, infaq, and sadaqah are crucial principles in maintaining economic justice.

Keywords: Islamic Economic; Human Development Index; Income Inequality; Open Unemployment; Poverty.;

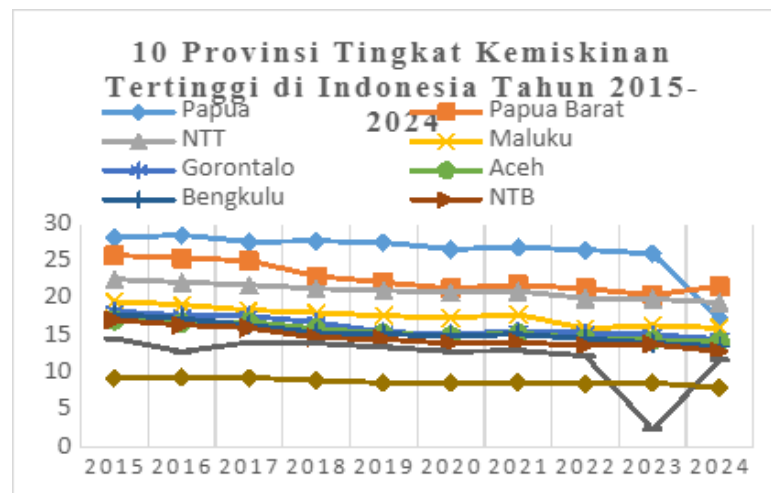
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di sepuluh provinsi dengan tetap memperhatikan keadilan ekonomi. Dalam penelitian ini, metode kuantitatif digunakan dengan data panel dari sumber resmi. Data yang digunakan berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik, dan kemudian dianalisis dengan metode regresi panel. Menurut pilihan model, Model Efek Tetap (FEM) adalah yang terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, IPM menunjukkan hubungan positif, meski tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan manusia belum berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka tidak terbukti memengaruhi tingkat kemiskinan. Dalam konteks ekonomi Islam, pemerataan distribusi kekayaan, perlindungan bagi kelompok rentan, serta peningkatan penggunaan instrumen sosial seperti zakat, infak, dan sedekah merupakan prinsip penting dalam mencapai keadilan ekonomi.

Kata Kunci: Ekonomi Islam; Indeks Pembangunan Manusia; Ketimpangan Pendapatan; Tingkat Pengangguran Terbuka; Tingkat Kemiskinan.;

1. PENDAHULUAN

Dalam banyak negara, kemiskinan adalah masalah sosial dan ekonomi. Kondisi ini merupakan permasalahan sosial jangka panjang yang hingga kini masih sulit untuk diatasi secara menyeluruh. Fenomena kemiskinan banyak kita lihat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Banyak orang tidak memiliki kemampuan untuk mengubah kehidupan mereka sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang layak dan manusiawi karena mereka miskin (Purnama, 2010). Jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti yang diharapkan, itu disebut miskin (Kurniasih, 2002). Dalam upaya mengurangi kemiskinan, pemerintah Indonesia terus melakukan pembangunan yang merata di berbagai sektor sebagai langkah menuju peningkatan kesejahteraan, seperti bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, beberapa intervensi tersebut belum memberikan dampak yang optimal dalam menekan nilai kemiskinan. Pemerintah pun menyadari bahwa meskipun kemiskinan merupakan masalah kompleks, penanganannya tetap dapat diupayakan melalui strategi yang tepat serta berkelanjutan (Mulyana, 2017).

Kemiskinan muncul karena sejumlah penyebab, seperti rendahnya upah minimum, kondisi kehidupan masyarakat yang buruk, serta tingkat pengangguran yang terus meningkat setiap tahun tanpa adanya penambahan kesempatan kerja (Prayoga et al., 2021). Aspek lain yang menjadi perhatian adalah ketidakmerataan dalam pendapatan serta indeks pembangunan manusia (IPM). Kemiskinan dapat dianalisis berdasarkan provinsi pada grafik di bawah ini:



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Indonesia

Gambar 1. Grafik Kemiskinan Tahun 2015-2024

Grafik ini memperlihatkan dinamika penurunan yang relatif konsisten, meskipun dengan variasi antarwilayah. Papua dan Papua Barat cenderung mempertahankan tingkat kemiskinan tertinggi, misalnya Papua yang berada pada 28,17% di tahun 2015 dan menurun secara bertahap hingga 17,26% pada 2024. Provinsi seperti Maluku, Gorontalo, dan Bengkulu juga menunjukkan tren penurunan, meskipun laju penurunannya lebih moderat. Aceh dan Sulawesi Selatan terlihat stabil dengan penurunan bertahap, sedangkan NTT tetap berada pada level menengah namun menunjukkan kecenderungan menurun dari 25,82% (2015) menjadi 21,66% (2024).

Adapun variabel ketimpangan pendapatan sebagai indikator distribusi kesejahteraan, ketimpangan pendapatan dapat menciptakan jurang ekonomi yang dalam antara kelompok kaya dan miskin, sehingga meningkatkan level kemiskinan. Ketidaksetaraan dalam pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat umum dikenal sebagai ketimpangan pendapatan, yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam tingkat pendapatan. Perubahan dalam jumlah pendapatan yang diterima masyarakat umum menyebabkan ketidaksetaraan dalam pendapatan di antara berbagai kelompok masyarakat (Todaro & Smith, 2014). Dengan peningkatan pendapatan, beberapa wilayah di Indonesia mungkin mengalami peningkatan kriminalitas, masalah ekonomi, perpecahan sosial, dan perpecahan tenaga kerja.

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perkembangan manusia dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jika IPM rendah, mungkin berdampak negatif pada produktivitas pekerja karena memiliki potensi untuk menurunkan produktivitas, yang pada pasangannya dapat menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan (Arifa Kurniawan, 2024). Individu dengan pendidikan tinggi memiliki lebih banyak keterampilan dan kemampuan yang dapat meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Jika IPM tidak memadai, masyarakat akan kurang produktif dan lebih sedikit sumber daya yang tersedia. Sebaliknya, situasi pendapatan rendah menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan (Sirait, 2023).

Selain itu, pengangguran adalah masalah yang sulit dipahami karena dipengaruhi oleh banyak variabel yang saling terkait. Apabila situasi ini tidak ditangani dengan cepat, maka akan timbul kerentanan sosial yang dapat berpotensi memicu kenaikan angka kemiskinan. Pengangguran berlaku ketika jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia di suatu wilayah atau negara lebih rendah daripada jumlah pekerjaan yang tersedia. Keadaan tersebut menyebabkan pertumbuhan tenaga kerja melebihi kapasitas penyerapan kerja yang tersedia (Muslim, 2014). Selain itu, penurunan permintaan agregat dapat menurunkan tingkat produksi perusahaan, sehingga kebutuhan tenaga kerja menurun dan jumlah pengangguran pun meningkat.

Dalam perspektif Islam, keadaan miskin dianggap sebagai isu yang berpotensi merusak jiwa dan keyakinan individu karena erat kaitannya dengan kekufuran. Dengan kehidupan yang serba kekurangan, individu tidak mampu menjalankan perintah agama dengan optimal, tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, serta tidak memiliki akses ke kesehatan dan hidup yang bahagia. Akibatnya, agama Islam mendorong generasi berikutnya untuk hidup yang bahagia baik dalam aspek agama, ilmu pengetahuan, maupun ekonomi (kemakmuran), sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْ ء لَوْ أَنَّ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَالِمٌ

Artinya: "(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebajikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Mahatahu tentang itu." QS. Al-Baqarah: 273

Penelitian ini menghadirkan kontribusi ilmiah yang signifikan karena beberapa hal. Pertama, Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan studi sebelumnya yang umumnya menggunakan data panel pada tingkat nasional atau seluruh provinsi. Contohnya, Azizah & Lubis meneliti pengaruh IPM dan pengangguran terhadap kemiskinan di 34 provinsi, sementara studi lain berfokus pada wilayah tertentu, seperti analisis ketimpangan, IPM, dan kemiskinan di Provinsi Papua pada periode 2014–2019 (Aprilliansyah et al., 2025). Kedua, mayoritas penelitian sebelumnya masih menggunakan kerangka ekonomi konvensional, seperti penelitian yang menemukan pengaruh signifikan Indeks Gini terhadap kemiskinan nasional tanpa memasukkan perspektif nilai-nilai normatif terkait keadilan ekonomi (Apriyanti & Rospida, 2025). Ketiga, meskipun ada penelitian yang menggabungkan variabel IPM dan pengangguran seperti studi yang meneliti dampaknya terhadap kemiskinan di Indonesia selama 2014-2023 (Alvia et al., 2024), hanya segelintir orang yang mencoba memasukkan analisis itu dalam konteks ekonomi Islam yang menyoroti prinsip keadilan dalam distribusi, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini melakukan analisis simultan terhadap ketimpangan pendapatan, IPM, dan pengangguran pada 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi selama periode 2015-2024, serta menafsirkan temuan empiris melalui perspektif ekonomi Islam, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan sosial.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dan data sekunder. Badan Pusat Statistik adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagai variabel independen, indeks pembangunan manusia, angka pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan digunakan. Untuk panel data analysis, ada tiga model alternatif: Common Effect Model, Fixed Effect Model, and Random Effect Model. Setiap model dievaluasi untuk menentukan mana yang paling cocok untuk digunakan. Sebuah pendekatan formal yang digunakan oleh Uji Chow dan Uji Hausman digunakan untuk memilih model, dan Eviews 12 digunakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi CEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	100.0367	7.916215	12.63694	0.0000
KP	-17.44805	9.093520	-1.918735	0.0580
IPM	-1.136990	0.088419	-12.85918	0.0000
TPT	0.232385	0.209155	1.111065	0.2693
R-squared	0.646433			

Sumber: output evIEWS 12 (data diolah tahun 2025)

Persamaan hasil regresi data panel dengan metode common effect:

TK: $100.0367 - 17.44805KP - 1.136990IPM + 0.232385TPT + e$

Berdasarkan hasil uji common effect model (CEM), variabel tingkat ketimpangan menunjukkan koefisien sebesar $-17,4480$ dengan nilai probabilitas $0,0580$ yang berada di atas batas signifikansi $0,05$. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Sementara itu, variabel indeks pembangunan manusia menghasilkan koefisien $-1,136990$ dan nilai probabilitas $0,0000$ yang lebih kecil dari $0,05$. Dengan demikian, variabel ini terbukti berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di wilayah penelitian. Adapun variabel tingkat pengangguran terbuka memperoleh koefisien $0,232385$ dan nilai probabilitas $0,2693$, yang juga melebihi $0,05$. Hal ini menandakan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di 10 provinsi tersebut. Hasil uji CEM juga menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar $0,646433$. Artinya, model mampu menjelaskan hubungan antara ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan sebesar $64,64\%$, sedangkan $35,36\%$ sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Tabel 2. Hasil Estimasi Regresi FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	55.33490	4.276140	12.94039	0.0000
KP	5.061789	3.932133	1.287288	0.2014
IPM	-0.595819	0.045270	-13.16137	0.0000
TPT	0.151439	0.096149	1.575040	0.1189
R-squared	0.984423			

Sumber: output eviws 12(diolah tahun 2025)

Persamaan hasil regresi data panel dengan metode fixed effect:

$$TK: 55.33490 - 5.061789KP - 0.595819IPM + 0.151439TPT + e$$

Berdasarkan hasil estimasi data panel dengan pendekatan fixed effect, diperoleh bahwa variabel ketimpangan pendapatan memiliki nilai koefisien $5,061789$ dengan probabilitas $0,2014$, yang masih berada di atas batas signifikansi $0,05$. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap tingkat kemiskinan pada 10 provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Sementara itu, variabel indeks pembangunan manusia menunjukkan koefisien $-0,595819$ dengan probabilitas $0,0000$ yang berada di bawah $0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut. Adapun variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki koefisien sebesar $0,151439$ dengan nilai probabilitas $0,1189$, yang berarti variabel ini tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 10 provinsi yang dikaji. Selain itu, uji fixed effect menghasilkan nilai koefisien determinasi sebesar $0,984423$. Nilai ini menandakan bahwa model mampu menjelaskan keterkaitan antara ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, serta tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan sebesar $98,44\%$, sedangkan sisanya sekitar $1,56\%$ dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Table 3. Hasil Estimasi Regresi REM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	40.35564	4.798295	8.410413	0.0000
KP	18.49410	6.362924	2.906542	0.0045
IPM	-0.432042	0.045637	-9.467010	0.0000
TPT	-0.084499	0.159622	-0.529370	0.5978
R-squared	0.600128			

Sumber: output eviews 12 (diolah tahun 2025)

Persamaan hasil regresi data panel dengan metode random effect model:

$$TK: 40.35564 + 18.49410KP - 0.432042IPM - 0.084499TPT + e$$

Hasil regresi data panel menggunakan pendekatan random effect menunjukkan bahwa variabel ketimpangan pendapatan memiliki koefisien sebesar 18,49410 dengan nilai probabilitas 0,0045, yang berada di bawah batas signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada 10 provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Selanjutnya, variabel indeks pembangunan manusia memperoleh koefisien -0,432042 dan probabilitas 0,0000, sehingga dapat dipastikan bahwa indikator ini juga memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah yang sama. Berbeda dengan keduanya, variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki koefisien -0,084499 dengan probabilitas 0,5978, yang melebihi batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, variabel tersebut tidak menunjukkan pengaruh nyata terhadap tingkat kemiskinan di 10 provinsi tersebut. Nilai koefisien determinasi yang dihasilkan dari model random effect sebesar 0,600128, yang berarti model mampu menjelaskan hubungan ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan sebesar 60,01%. Sementara itu, 39,99% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Pengujian berikut dilakukan untuk memilih model terbaik dari ketiga model tersebut:

1. Hasil Uji Chow

Tabel 4. uji chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	95.874811	(9,87)	0.0000
Cross-section Chi-square	239.042049	9	0.0000

Sumber: output eviews 12 (2025)

Berdasarkan hasil pengujian, nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang berada di bawah batas signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0), yaitu model yang sesuai adalah Common Effect Model (CEM), harus ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternatif (H_1) yang menyatakan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang lebih tepat, diterima. Dengan demikian, uji Chow mengindikasikan bahwa model yang paling sesuai untuk digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

2. Hasil Uji Hausman

Tabel 5. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.558203	3	0.0014

Sumber: Output Eviews 12 (2025)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,0014, berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Dengan kondisi tersebut, hipotesis H_1 dinyatakan diterima, sehingga model yang layak digunakan dalam analisis adalah Fixed Effect Model (FEM).

Interpensi Koefisien Fixed Effect Model

Hasil tersebut menunjukkan bahwa:

1. Nilai koefisien ketimpangan pendapatan sebesar 5.061789 dengan probabilitas 0.000 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan ketimpangan pendapatan sebesar 1% akan diikuti penurunan tingkat kemiskinan di 10 provinsi di Indonesia sebesar 5,06%. Temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan di 10 provinsi di Indonesia.
2. Koefisien indeks pembangunan manusia bernilai -0,595819. Artinya, ketika indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan sebesar 1%, tingkat kemiskinan di 10 provinsi di Indonesia justru bertambah sekitar 0,59%. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif sekaligus signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 10 provinsi di Indonesia.
3. Koefisien tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,151439 menunjukkan bahwa kenaikan 1% pada variabel ini diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan sekitar 0,15%. Meskipun demikian, hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 10 provinsi di Indonesia.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	37.55200	4.830896	7.773300	0.0000
KP	21.15666	6.551728	3.229172	0.0018
IPM	-0.403804	0.046265	-8.728158	0.0000
TPT	-0.103709	0.165762	-0.625646	0.5332

Selanjutnya, uji dilakukan pada koefisien determinasi, signifikansi secara parsial (uji t), dan simultan (uji F). Hasilnya menunjukkan hal-hal berikut:

- a. Uji Signifikan secara Parsial (Uji t)

Tabel 6. Uji T

Sumber: output Eviews 12 (data diolah tahun 2025)

1. Tingkat signifikansi variabel ketimpangan pendapatan tercatat sebesar 0.0018, yang berada di bawah 0,05, serta didukung oleh nilai sebesar 3.229172. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel ketimpangan pendapatan (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y) di 10 provinsi di Indonesia.

2. Nilai signifikansi variabel indeks pembangunan manusia tercatat sebesar 0,0000, yang berada di bawah batas 0,05, serta diperkuat oleh nilai sebesar -8,728158. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y) pada 10 provinsi di Indonesia.
 3. Tingkat signifikansi variabel tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 0.5332, yang melebihi batas 0,05, serta didukung oleh nilai sebesar -0.625646. Hal ini menandakan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka (X3) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y) di 10 provinsi di Indonesia.
- b. Uji F (Simultan)

Tabel 7. Uji F

F-statistik	216.6288
Prob (F-statistik)	0.000000

Sumber: output Eviews 12 (data diolah tahun 2025)

Berdasarkan tabel tersebut, nilai F-hitung pada uji F tercatat sebesar 0,000000, yang berada di bawah batas signifikansi 0,05. Kondisi ini mengindikasikan bahwa H4 dapat diterima, yaitu seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan demikian, variabel-variabel independen tersebut mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan.

- c. Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.967616
Adjusted R-squared	0.963150

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R Square dapat dilihat pada kolom R Square, di mana nilai R² berada di bawah angka 1, yaitu dalam rentang 0 hingga 0,963150. Berdasarkan output tersebut, nilai R Square yang diperoleh adalah 0,967616 atau setara dengan 96,76%. Persentase ini menggambarkan bahwa variabel-variabel independen, yaitu ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka pada sepuluh provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 96,76%. Artinya, model yang digunakan dapat menerangkan perubahan variabel terikat secara kuat. Adapun sisanya, sekitar 3,24%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel ketimpangan pendapatan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Persentase orang miskin meningkat di berbagai provinsi Indonesia karena peningkatan ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Pendapat ini sejalan dengan paradigma sosial demokrasi yang menyatakan bahwa bukan hanya pendapatan rendahnya saja yang menyebabkan kemiskinan tetapi juga sebaran sumber daya non-merata. Ketika peluang ekonomi tidak tersebar secara adil, kelompok masyarakat yang memiliki posisi lebih menguntungkan cenderung meningkatkan kesejahteraannya, sementara kelompok yang terbatas aksesnya tetap berada dalam kondisi rentan.

Selain itu, temuan ini mendukung temuan sebelumnya. Misalnya, studi yang dilakukan di Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta antara tahun 2009 dan 2022 menemukan bahwa pendapatan ketimpangan berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia (N. Anggraini et al., 2024), dan studi lain yang menemukan bahwa ketimpangan pendapatan, bersama dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan pendidikan dan pekerjaan yang berdampak pada kemiskinan Indonesia pada tahun 2021 (Aryanti & Sukardi, 2024), sehingga menegaskan pentingnya pemerataan kesempatan ekonomi dalam upaya pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan analisis regresi data panel, variabel indeks pembangunan manusia memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Menurut teori ekonomi manusia, jika upah dianggap sebagai representasi dari produktivitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan menunjukkan tingkat produktivitas dan pencapaian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan individu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Akibatnya, lebih banyak individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan menghasilkan lebih banyak barang daripada individu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah.

Hal ini terkait dengan sejumlah besar penelitian sebelumnya, termasuk (Fiskal et al., 2020), (Desmawan et al., 2021), (Nunung Robiatul Rifkah, 2021), (Ayu et al., 2021) Ini menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, penurunan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan disebabkan oleh upaya IPM untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini menegaskan bahwa pengembangan manusia sangat berkaitan dengan upaya mengatasi kemiskinan. Situasi ini juga sejalan dengan tren peningkatan IPM di provinsi-provinsi di Indonesia, di mana peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat. Memperkuat kemampuan dasar masyarakat akan meningkatkan kualitas hidup mereka dan memberi mereka kesempatan untuk mengambil bagian dalam pembangunan masa depan (Prasetyoningrum et al., 2018).

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka memberikan pengaruh negatif, tetapi tanpa signifikansi terhadap tingkat kemiskinan di sepuluh provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Ini dapat disebabkan oleh faktor lain yang lebih umum dalam masalah kemiskinan atau pengangguran terbuka di daerah tersebut tidak secara langsung mencerminkan situasi ekonomi dari keluarga yang berada dalam kondisi miskin. Faktor-faktor tersebut mencakup variasi jenis pekerjaan, keberadaan sektor informal, dan akses terhadap bantuan sosial yang dapat meredakan dampak pengangguran terhadap kemiskinan.

Sejalan dengan teori Lewis, yang menyatakan bahwa kepuasan karyawan harus dilihat sebagai keuntungan daripada masalah karena jumlah karyawan yang lebih besar dalam satu industri dapat meningkatkan output dan ketersediaan karyawan di industri lain. Dengan kata lain, menurut Lewis, surplus tenaga kerja tidaklah menjadi hambatan bagi kemajuan ekonomi. Temuan penelitian ini juga mendukung pandangan dari Whisnu Adhi Saputra (2011), menurutnya, kelompok pengangguran terbuka mencakup berbagai orang, seperti orang yang secara aktif mencari pekerjaan saat menjalankan bisnis mereka atau orang yang

tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak melihat peluang. Mereka juga termasuk orang yang telah menyelesaikan pekerjaan mereka tetapi belum menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka.

Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Secara Simultan terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan penelitian yang hasil regresi data panel, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka secara kolektif terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di 10 provinsi dengan proporsi kemiskinan tertinggi di Indonesia. Hasil analisis regresi menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,967616, yang berarti sekitar 96,76% dari variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas tersebut, sedangkan 3,24% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Seperti perspektif teori neo-liberal yang memandang kemiskinan sebagai masalah struktural yang lebih kompleks, bukan semata-mata akibat kelemahan individu.

Dalam pemikiran Shanon, Spicker, O'Brien, dan Belgrafe, ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka bukan muncul dari faktor personal, tetapi dari kondisi sosial ekonomi yang tidak merata, seperti distribusi pendapatan yang timpang, rendahnya akses layanan dasar, serta kualitas manusia yang belum optimal. Temuan bahwa ketiga variabel tersebut menjelaskan hampir seluruh variasi kemiskinan memperkuat pandangan bahwa kemiskinan merupakan dampak dari struktur pembangunan yang belum inklusif. Sejalan dengan teori ini, penanggulangan kemiskinan menuntut adanya intervensi institusional yang lebih kuat melalui penyediaan jaminan sosial, bantuan pemerintah, dan kebijakan publik yang lebih menyentuh akar persoalan. Dengan kata lain, peran negara tetap dibutuhkan untuk mengisi kekosongan yang tidak dapat ditangani oleh mekanisme pasar maupun lembaga sosial secara mandiri.

Perspektif Islam Memandang Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Kemiskinan

Menurut Al Ghozali, kemiskinan tidak didefinisikan sebagai ketersediaan barang yang tidak dibutuhkan seseorang; sebaliknya, itu didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Al Ghozali membedakan kemiskinan berdasarkan kebutuhan material dan spiritual (D. Anggraini & Fasa, 2023). Menurut Al-Qur'an, prinsip keadilan dalam pembagian pendapatan dan kekayaan sangat dipegang, sehingga setiap orang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat, serta status manusia sebagai saksi dunia Allah, meskipun ada beberapa orang yang percaya bahwa manusia dapat menjadi khalifah di dunia, Allah tetap siap untuk melakukannya. Allah berjanji bahwa saya akan memahami hal-hal yang orang lain tidak dapat memahami, menekankan hikmah dan tanggung jawab manusia dalam pengelolaan bumi secara adil dan bijaksana.

Dari perspektif ekonomi Islam, kemajuan manusia dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan standar hidup setiap orang sesuai dengan Allah SWT. Peran manusia adalah strategi utama untuk kemajuan nasional dan dapat berkontribusi pada kemakmuran sebuah negara atau wilayah. Dalam teori ekonomi Islam, penting untuk menekankan perbedaan antara hal-hal duniawi dan spiritual, khususnya antara kebutuhan duniawi dan prinsip akhirat. "Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan," kata Surat An-Naba dalam Al-Quran. Islam menekankan pentingnya produktivitas dan mendorong orang Muslim untuk

mengejar pengangguran. Qardhawi membagi pengangguran menjadi dua kategori. First, pengangguran jabariyah adalah ketika seseorang tidak memiliki pilihan selain menganggur, biasanya karena kekurangan keterampilan. Namun, pengangguran khiyariyah adalah jenis pengangguran di mana seseorang memiliki kemampuan untuk bekerja tetapi memilih untuk bermalas-malasan dan tidak produktif, membuat mereka tidak produktif bagi orang lain (Fauziyyah et al., 2022).

4. KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana ketimpangan pendapatan, IPM, dan tingkat pengangguran memengaruhi kemiskinan di sepuluh provinsi di Indonesia. Selanjutnya, temuan-temuan tersebut dikaji dari perspektif ekonomi Islam. Ketimpangan pendapatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan semakin tinggi tingkat pendapatan dalam populasi, semakin banyak orang miskin di setiap provinsi Indonesia. Berarti bahwa ketidakseimbangan distribusi pendapatan dapat menyebabkan perbedaan kesejahteraan yang lebih besar. Selain itu, tinggi ketimpangan membuat komunitas miskin menjadi lebih sulit untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, serta layanan kesehatan, yang pada akhirnya memperburuk situasi kemiskinan.

Indeks pembangunan manusia memiliki efek negatif yang sangat besar pada angka kemiskinan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa saat indeks pembangunan manusia meningkat, angka kemiskinan cenderung menurun. Ini berarti bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang ditentukan oleh indeks pembangunan manusia berdampak pada penurunan jumlah orang yang hidup dalam keadaan miskin. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, IPM memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas pekerja umum. Pada akhirnya, ini akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi kemiskinan.

Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap angka kemiskinan. Ketidaksignifikan tersebut disebabkan oleh indikator TPT yang lebih terfokus pada sektor informal, seperti individu yang dalam pencarian pekerjaan, menyiapkan usaha, mereka yang enggan melamar pekerjaan karena merasa tidak ada kesempatan, serta yang belum memulai pekerjaan. Prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam terkait erat dengan pendapatan ketidakseimbangan, IPM, dan angka pengangguran. Pendapatan ketidakseimbangan menunjukkan bahwa pembagian kekayaan tidak seimbang, sementara IPM menunjukkan bahwa sumber daya manusia masih kurang dari standar, dan pengangguran menghambat upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat. Oleh karena itu, ketiga persoalan ini harus ditangani karena bertentangan dengan tujuan maqashid al-syari'ah yang berusaha mencapai kebaikan dan mengurangi kerugian untuk masyarakat.

REFERENSI

- Alvia, D. O., Efendi, I. W., Malihah, K. P., Kurniawan, M., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, K. B. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2014-2023. 2(6).
- Anggraini, D., & Fasa, M. I. (2023). Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. 18(1), 123–138. <https://doi.org/10.35448/jte.v18i1.13613>.

- Anggraini, N., Santosa, P. B., & Citaningati, P. R. (2024). Pengaruh Islamic Human Development Index , Pengangguran , Ketimpangan Pendapatan , dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2009-2022). 10(03), 3143–3153.
- Aprilliansyah, I., Pemerintahan, P. I., Yani, J. A., Manusia, I. P., & Barat, K. B. (2025). Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. 02(01).
- Apriyanti, M., & Rospida, L. (2025). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Indeks Gini Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia 2014-2023. 8(2), 439–455.
- Arifa Kurniawan, O. R. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2014-2023. *Jurnal Economina*, 3(4), 562–574. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i4.1296>
- Aryanti, E. D., & Sukardi, A. S. (2024). Pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia. 4(2), 117–133. <https://doi.org/10.53088/jerps.v4i2.918>
- Ayu, D., Candra, F., Viphindartin, S., & Diartho, H. C. (2021). Impact of Government Expenditure on Poverty Rate Reduction in East Java Province. 11(2), 120–127. <https://doi.org/10.30741/wiga.v11i2.606>
- Desmawan, D., Syaifudin, R., Mamola, R., Haya, H., Indriyani, D., Study, D., Economics, F. O., Sultan, U., Tirtayasa, A., City, S., & Capital, H. (2021). Determinant Factors Poverty of Relativity in Banten Province : A Panel Data Analysis. 131–141.
- Eunike Elisabeth Bawuno, J. B. K. dan J. I. S. (2015). Pengaruh Investasi Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado (Studi Pada Kota Manado Tahun 2003-2012). 15(04), 245–254.
- Fauziyyah, S., Tarihoran, N., & Sunardi, D. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Gender , Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Banten Periode Tahun 2013 -2020. 5(2), 187–198.
- Fiskal, M. Y., Titis, D., & Wardani, K. (2020). Determinants of Poverty in West Java Province After the Regional Expansion of Pangandaran District. 4(1). <https://doi.org/10.18196/jeress.040120>
- Fitriyah, L., & Rachmawati, L. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah Serta Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Gerbangkertosusila Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3), 1–16. <https://doi.org/10.26740/jupe.v1n3.p%25p>
- Kurniasih, T. (2002). Dimensi Kemiskinan. 47.
- Margaretha Larasati Prayoga, Muchtolifah, S. (2021). Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. 3(2), 135–143. <https://doi.org/10.37479/jeej.v3i2.11058>
- Muhammad Nashih, Novegya Ratih Primandari, Muthmainnah, Sulaiman Efendi Siregar, T. W. U. (2024). Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dalam Memediasi Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Pulau Kalimantan. 08(02), 1–11. <https://doi.org/10.33772/jpep.v8i1.258>

- Mulyana, M. &. (2017). Analisis kebijakan pengentasan kemiskinan di indonesia. 10(1), 73–96.
- Muslim, M. R. (2014). Pengangguran Terbuka Dan Determinannya. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan Volume 15, Nomor 2, 15(2), 171–181. <http://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/download/1234/1292>
- Nunung Robiatul Rifkah, R. N. (2021). Indonesian Journal of Islamic Economics Research. 3(1), 15–26.
- Purnama, N. I. (2010). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara. 62–70. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i1.1181>
- Sirait, H. P. B. (2023). Analisis Pengaruh Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Regional Kalimantan. Journal Magister Ilmu Ekonomi, 9(1), 39–54.
- Suci Rahmalia, Ariusni, M. T. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan, 1(1), 21–36.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). Economic Development.